

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Prajudi Admosudirjo. Hukum Administrasi Negara. cet. 9. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Lutfil Anshori. Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan. Raja Grafindo, Depok, 2019.
- Jimmy Asshiddiqie. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekjen Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- _____ . Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Konpress, Jakarta, 2006.
- _____ . Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Edmon Makarim, Komplikasi Hukum Telematika. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Maria Farida Indrati Soeprato. Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Maria Farida Idrati. Ilmu Perundang-Undangan 2. Kanisius, Depok, 2007.
- Indroharto. Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Eny Kusdarini. Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. cet-ke 6 Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1991.
- Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cet. 1. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Ni'matul Huda, Imam Nasef. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Kencana, Jakarta, 2017.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Nurmayani. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Thalib, Abdul Rasyid. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Nur Basuki Winanmo. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bagir Manan. Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000.
- T. Sri Soemantri. Lembaga Negara Dan State Auxiliary Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Departemen Hukum Dan HAM RI, Surabaya, 2007.
- King Faisal Sulaiman. Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- M. Khozim. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Moh. Mahfud MD. Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Putera Astomo. Ilmu Perundang-undangan, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Sukmareni. Implikasi Pengaturan Kewenangan Penyidikan Terhadap Upaya Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Tentang Model Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Disertasi, Pascasarjana FHUA, 2019.

B. JURNAL

- Philipus M. Hadjon. Tentang Wewenang. Yuridika. Volume No. 5 & 6. Tahun XII. September-Desember, 1997.
- Abdul Tayib. Sumarni. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Tindakan Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Unizar Law Review, Volume 3 Issue 1, Juni 2020, hal. 50.
- Sukmareni dkk. Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
pagaruyuang law jurnal, Volume 3 No. 2, Januari 2020, hal, 206.

Agus Suntoro. Penjadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi
Indonesia, Vol 17 No. 1, 2020, hal. 30.

Hujjatul Hasanah, Penggunaan Hasil Penjadapan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Dan
Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, FH UNRAM, 2018,
hal 9.

C. WEBSITE

Evi Fitriyani Aulia, Kekuasaan dan Kewenangan, diakses dari
<https://www.kompasiana.com/epoooy19/552fc21e6ea83417338b4567/kekuasaan-dan-kewenangan>, diakses 21 September 2021 Jam
22.47 WIB.

Sony Pungus, Teori Kewenangan, diakses dari <http://sonnytobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, diakses 22
September 2021 Jam 17.12 WIB.

CNN Indonesia, Komnas HAM Nilai Polri Berlebihan Tangani Demo
September, Edisi 12 Oktober 2019, diakses dari
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191012093542-20-438906/komnas-ham-nilai-polri-berlebihan-tangani-demoseptember>, diakses pada 7 juli 2022.

Prolegnas 2019-2024, diakses dari <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>.

Rizky Andwika, Ini Kasus Kakap yang dibongkar KPK dari hasil
Penjadapan, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kasus-kakap-yang-dibongkar-kpk-dari-hasilpenjadapan.html>, diakses
pada 04 juli 2022.

Super User, Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Anti-
Corruption Clearing House, 6 Januari 2016)
<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>, diakses 18
September 2021.

D. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019.